

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektifitas realisasi belanja pemerintah untuk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Gambaran Pengalokasian Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan belanjanya kedalam beberapa kelompok yakni: 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga; dan 4) Belanja Transfer.

2. Efektivitas atas Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Berdasarkan data yang terdapat di laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Barat, anggaran atas belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menyentuh nominal total Rp43.263.671.357.326,00 dan terealisasi sebesar Rp38.127.531.749.249,00 dengan persentase realisasi terhadap anggaran sebesar 88,13%. Dapat disimpulkan bahwa Realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 termasuk ke dalam kriteria “Cukup Efektif”.

3. Menurut kriteria efektivitas keuangan, penyerapan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi dengan angka penyerapan sebesar 93,47% yang mengalami kenaikan 5,8% dari Tahun Anggaran 2019 dapat dikatakan “efektif”.
 - b) Belanja Modal dengan angka penyerapan sebesar 92,89% yang mengalami penurunan 33,9% dari Tahun Anggaran 2019 dapat dikatakan “efektif”.
 - c) Belanja Tidak Terduga dengan angka penyerapan sebesar 67,71% yang mengalami kenaikan 100% dari Tahun Anggaran 2019 dapat dikatakan “kurang efektif”.
 - d) Transfer dengan angka penyerapan sebesar 85,76% yang mengalami penurunan 8,7% dari Tahun Anggaran 2019 dapat dikatakan “cukup efektif”.
4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020

Adanya pandemi infeksi Covid-19 yang membutuhkan tindakan pencegahan, penanggulangan, deteksi, dan pengobatan yang mengakibatkan adanya pergeseran anggaran pada pos belanja tidak terduga. Selain itu, diberikannya bantuan kepada Badan/Lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19, adanya pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja hibah, dan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaringan pengaman sosial, rencana belanja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal, APBD pada awal tahun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya proses administrasi yang masih dalam penyesuaian, serta efisiensi atau penghematan pada beberapa belanja daerah.